

PENGARUH VARIABEL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA

Joko Susanto¹

Abstract

This study analysis the influence of the labor's variable to foreign direct investment in Indonesia. The labor's variables include the provincial minimum wage, the amount of labor strikes and Labor Union Act of Indonesia (Act No. 21 of 2000). This study uses data from the Indonesia Investment Coordinating Board and the Ministry of Manpower and Transmigration. The dynamic regression model is used in this research. The results show that the number of labor strikes and the provincial minimum wage have a negative influence to foreign direct investment. Meanwhile, Labor Union Act of Indonesia (Act No. 21 of 2000) has no influence to foreign direct investment.

Key words : Foreign Direct Investment, Labor Strike, Provincial Minimum Wage, Labor Union Act of Indonesia

PENDAHULUAN

Terlepas dari pro dan kontra tentang dampak kehadiran perusahaan multinasional (*MNC*), pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya guna menarik penanaman modal asing langsung. Penanaman modal asing langsung dinilai memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Masuknya penanaman modal asing langsung merupakan salah satu komponen pokok sekaligus sebagai katalis dalam pembangunan ekonomi (Markusen, 1997).

Di sisi lain, perusahaan multinasional juga berupaya untuk mencari lokasi produksi baru yang lebih menguntungkan. Mereka menginginkan biaya produksi lebih murah agar daya saing produk meningkat. Dalam penentuan lokasi produksi maka pertimbangan biaya produksi memiliki bobot lebih besar daripada pertimbangan luas pangsa pasar lokal (Blomström dan Kokko, 2003). Perusahaan multinasional akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi di negara penerima investasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah kebijakan pemerintah negara penerima investasi, ketersediaan sumber daya, luas pasar, lokasi geografi, dan harga input (*UNTAD*, 2000).

Salah satu biaya produksi adalah biaya tenaga kerja. Biaya ini merupakan biaya terbesar kedua setelah biaya bahan baku (Susanto, 2009). Biaya tenaga kerja terkait dengan tingkat upah pekerja. Upah merupakan komponen biaya bagi pengusaha. Pengusaha berusaha meminimumkan biaya agar dapat memperoleh laba maksimum.

Tingkat upah yang terjadi dipengaruhi antara lain oleh tinggi rendahnya upah minimum propinsi (*UMP*). Apabila *UMP* mengalami kenaikan, maka terjadilah fenomena upah sundulan. Dengan alasan *fairness*, maka pekerja yang upahnya sudah di atas *UMP* ikut menuntut kenaikan upah. Apabila secara umum tingkat upah mengalami kenaikan, maka perusahaan multinasional kesulitan untuk mengendalikan biaya tenaga kerja

¹ Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email : jk.susanto.68@gmail.com

sehingga kinerja perusahaan terganggu. Untuk itu, perusahaan multinasional akan mencermati upah minimum propinsi (*UMP*).

Hal lain yang perlu dicermati oleh perusahaan multinasional adalah kemungkinan terjadi pemogokan. Sebagian besar pemogokan terjadi pada sektor industri manufaktur (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2001). Pemogokan pekerja merugikan perusahaan karena selama pemogokan kegiatan produksi terganggu bahkan tidak berjalan, sedangkan perusahaan masih tetap harus membayar upah pekerjanya. Selama pemogokan, perusahaan tidak dapat menghasilkan output, sedangkan perusahaan biasanya sudah terikat perjanjian dengan pembeli untuk mengirimkan output sesuai dengan pesanan (Barutu, 2003).

Sementara itu, sistem hubungan industrial di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan pengesahan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Pengesahan undang-undang tersebut menyebabkan sistem hubungan industrial berubah dari sistem yang sangat terpusat dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat ke sistem yang terdesentralisasi (Feridhanusetyawan dan Pangestu : 2004). Dalam sistem baru ini kekuatan tawar pekerja meningkat sehingga tuntutan mereka akan perbaikan kondisi kerja meningkat. Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis pengaruh upah minimum propinsi (*UMP*), jumlah pemogokan, dan pemberlakuan undang-undang serikat pekerja terhadap penanaman modal asing langsung.

Secara umum perusahaan multinasional berupaya mencari lokasi dengan biaya produksi yang lebih murah (Utama, 2005). Perusahaan multinasional akan mempertimbangkan biaya produksi di negara penerima investasi dengan biaya produksi di negara asal investasi. Perusahaan multinasional akan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan biaya produksi termasuk faktor ketenagakerjaan di negara penerima investasi. Faktor ketenagakerjaan tersebut mencakup antara lain tingkat upah dan hubungan industrial termasuk seringnya terjadi pemogokan.

Tingkat upah dan kondisi hubungan industrial menjadi salah satu bahan pertimbangan perusahaan multinasional dalam memilih lokasi investasinya (Susanto dan Purwiyanta, 2010). Bagi perusahaan, upah merupakan komponen biaya tenaga kerja. Apabila biaya tenaga kerja tidak dapat dikendalikan, maka akan menurunkan efisiensi dan selanjutnya berdampak pada penurunan laba perusahaan bersangkutan. Perusahaan perlu mencermati tingkat upah minimum propinsi (*UMP*). Hal ini dikarenakan kenaikan *UMP* menyebabkan terjadinya fenomena upah sundulan sehingga pekerja lain yang upahnya sudah melebihi *UMP* juga ikut menuntut kenaikan upah (Tempo, 20 Januari, 2002). Kenaikan upah menyebabkan kenaikan biaya tenaga kerja dan pada gilirannya menyebabkan investor termasuk perusahaan multinasional enggan untuk menanamkan modalnya.

Bagi pekerja upah merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja menginginkan upah yang lebih tinggi agar kesejahteraannya meningkat. Tuntutan akan kenaikan upah sering kali menimbulkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Pekerja melakukan berbagai upaya agar tuntutan mereka terpenuhi termasuk dengan mogok kerja. Pemogokan pekerja mengakibatkan hilangnya sejumlah jam kerja dan menjadikan kacau target produksi yang sudah ditetapkan (Barutu, 2003). Pemogokan merugikan perusahaan sehingga mengurangi minat investor untuk melakukan penanaman modal asing langsung.

Selanjutnya, sistem hubungan industrial di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan pengesahan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Pengesahan undang-undang tersebut menyebabkan sistem hubungan industrial berubah dari sistem yang sangat terpusat dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat ke sistem

yang terdesentralisasi (Feridhanusetyawan dan Pangestu : 2004). Desentralisasi hubungan industrial memberikan kekuatan tawar lebih besar bagi serikat pekerja pada saat berunding dengan pengusaha. Kenaikan kekuatan tawar serikat pekerja memungkinkan adanya kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Kenaikan kekuatan tawar pekerja menyebabkan semakin tingginya tuntutan pekerja. Hal ini berarti mengurangi porsi pendapatan yang selama ini menjadi hak pengusaha. Pemberlakuan undang-undang serikat menyebabkan pengusaha enggan menanamkan modalnya. Selanjutnya penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pemogokan pekerja, upah minimum propinsi dan pemberlakuan undang-undang serikat pekerja berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data dari publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Data penelitian mencakup jumlah penanaman modal asing langsung, upah minimum propinsi (UMP), dan jumlah pemogokan selama periode 1990-2009. Data tersebut dilengkapi dengan data pengesahan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Berdasar sumber publikasinya, maka data upah minimum propinsi (UMP) dan jumlah pemogokan berasal dari publikasi Kemnakertrans. Selanjutnya data penanaman modal asing langsung berasal dari publikasi BKPM.

Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel.

Penanaman modal asing langsung (PMA) adalah keseluruhan realisasi penanaman modal asing langsung yang masuk ke Indonesia. Satuan yang digunakan adalah juta dollar.

Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah rata-rata upah minimum propinsi di pulau Jawa. Satuan yang dipergunakan adalah rupiah per bulan.

Jumlah pemogokan (MOGOK) adalah jumlah kasus pemogokan yang dilakukan oleh pekerja di Indonesia. Satuan yang dipergunakan adalah jumlah kasus.

Undang-undang Serikat Pekerja (UUSP) adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Untuk variabel ini dipergunakan variabel *dummy*. Variabel UUSP bernilai 1 untuk periode 2000 – 2009 dan bernilai 0 untuk periode lain.

Penelitian ini meliputi kondisi penanaman modal asing langsung mulai tahun 1990 sampai dengan 2009. Dengan demikian merupakan data runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu menghadapi permasalahan stasioneritas data. Suatu *series* data dikatakan stasioner jika memiliki varians dan nilai rata-rata yang konstan sepanjang periode pengamatan (Gujarati, 2003: 797). Apabila data yang digunakan tidak stasioner, maka koefisien regresi yang dihasilkan akan bias dan tidak konsisten. Estimasi berdasar regresi tersebut akan meleset. Selanjutnya untuk mengetahui apakah variabel yang diobservasi tidak stasioner atau stasioner digunakan uji akar-akar unit. Dalam penelitian ini digunakan uji akar-akar unit *Augmented Dickey Fuller (ADF)*.

Tahapan selanjutnya adalah uji kointegrasi. Melalui uji kointegrasi akan diketahui apakah suatu set variabel berkointegrasi ataukah tidak. Pendekatan ini berkaitan dengan kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel ekonomi seperti disumsikan teori ekonomi. Uji kointegrasi menggunakan model yang dikemukakan oleh Johansen.

Dalam ilmu ekonomi ketergantungan suatu variabel terikat atas variabel – variabel bebas jarang yang bersifat seketika. Sangat sering variabel terikat bereaksi terhadap variabel bebas dengan suatu selang waktu (Gujarati : 2003) Selang waktu tersebut dinamakan lag. Sehingga dalam analisis regresi dilakukan dengan memperhatikan adanya selang waktu (*lag*) tersebut. Dengan kata lain diwujudkan dalam suatu bentuk model dimanis.

Pembentukan model dinamis merupakan proses penting karena terkait dengan perubahan waktu. Model dinamis diperlukan karena variasi variabel endogen pada periode yang berlaku tidak hanya ditentukan oleh variasi variabel eksogen dalam periode yang sama. Variabel endogen perlu selang waktu (*lag*) untuk menanggapi variabel eksogen. Model dinamis mampu membuat teori yang bersifat statis menjadi dinamis dengan memperhitungkan secara eksplisit unsur waktu.

Estimasi jangka pendek terhadap model penanaman modal asing langsung dituliskan dalam suatu model regresi dinamis berikut.

$$dLPMA_t = \alpha_1 + \sum_{j=1}^k \beta_j dLPMA_{t-j} + \sum_{j=1}^k \gamma_j dLMOGOK_{t-j} + \sum_{j=1}^k \delta_j dLUMP_{t-j} + \varphi_j UUSP + \lambda_j ECT_{t-1} + e_t$$

Koefisien β dan φ diharapkan bertanda positif, sedangkan koefisien γ , dan δ diharapkan bertanda negatif. Dengan melakukan estimasi terhadap persamaan ECM dengan *lag* yang tepat, maka koefisien parameter estimasi jangka pendek dapat diketahui. Begitu juga dengan koefisien kecepatan penyesuaian ($\lambda = \text{speed of adjustment}$), dengan koefisien bertanda negatif. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kecepatan penanaman modal asing langsung menuju kondisi equilibrium jangka panjang. Model yang dibangun merupakan model jangka pendek sehingga nilai koefisien regresi diinterpretasikan sebagai pengaruh variabel independen dalam jangka pendek.

Dalam model jangka pendek, penentuan panjang *lag* menjadi isu penting. Hal ini dikarenakan *lag* terlalu pendek berisiko terjadi kesalahan spesifikasi model, sedangkan *lag* terlalu panjang banyak mengurangi derajat kebebasan. Untuk menghindari kesalahan spesifikasi, penentuan panjang *lag* dalam penelitian ini menggunakan kriteria Akaike (*AIC*). Hal ini dikarenakan kriteria Akaike (*AIC*) lebih unggul dibandingkan kriteria lain (Liew, 2004). Nilai kriteria Akaike (*AIC*) yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Selanjutnya dilakukan pengujian *redundant variable* guna memperoleh model estimasi yang sederhana (*parsimony*).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah variabel yang diobservasi tidak stasioner atau stasioner digunakan uji akar-akar unit. Hasil uji akar-akar unit *Augmented Dickey Fuller (ADF)* menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model belum stasioner pada *level* kecuali variabel jumlah pemogokan (*MOGOK*). Untuk itu pengujian dilanjutkan dengan uji derajat integrasi guna mengetahui pada derajat integrasi ke berapa variabel-variabel tersebut stasioner. Hasil uji derajat integrasi menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model sudah stasioner pada derajat integrasi pertama (Tabel 1).

Tabel 1

Hasil Uji Akar-Akar Unit *Augmented Dickey Fuller (ADF)*

Variabel	Aras (<i>level</i>)		Diferensi Pertama	
	t-statistik	Nilai Kritis ($\alpha=5\%$)	t-statistik	Nilai Kritis ($\alpha=5\%$)
<i>LPMA</i>	-2,785	-3,029	-4,700)*	-3,040
<i>LMOGOK</i>	-5,156)*	-3,209		
<i>LUMP</i>	-2,895	-3,392	-3,189)*	-3,040

*) signifikan pada tingkat ($\alpha=5\%$)

Setelah diketahui bahwa variabel dalam stasioner pada derajat integrasi pertama, maka tahapan selanjutnya adalah uji kointegrasi untuk apakah suatu set variabel berkointegrasi ataukah tidak. Hasil pengujian kointegrasi menunjukkan adanya penolakan

terhadap hipotesis H_0 yang menyatakan tidak adanya kointegrasi (Tabel 2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 vektor kointegrasi, atau paling tidak 1 kombinasi linear independen dari variabel-variabel tersebut yang stasioner. Variabel-variabel dalam model berkointegrasi atau memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang seperti yang dikehendaki teori ekonomi.

Tabel 2.
Uji Kointegrasi Johansen

Hipotesis Nol : r	Eigenvalue	Trace Statistik	Nilai Kritis ($\alpha=5\%$)
0)*	0,825	62,417)*	47,856
1)*	0,669	30,996)*	29,797
2	0,263	11,116	15,495
3	0,154	3,013	3,841

*) signifikan pada tingkat ($\alpha=5\%$)

Selanjutnya untuk menghindari kesalahan spesifikasi model, penentuan panjang lag dalam penelitian ini menggunakan kriteria Akaike (*Akaike Information Criterion*). Berdasar hasil estimasi *Vector Autoregressions (VAR)*, nilai *AIC* minimum terjadi pada saat panjang lag adalah 2 tahun. Estimasi *VAR* dengan panjang lag 2 merupakan *parsimonious VAR* (Tabel 3).

Tabel 3.
Penentuan Panjang Lag Berdasar Kriteria Akaike

Nomor	Panjang Lag	Nilai Akaike
1	1 1	1,186
2	1 2	1,303
3	2 2	1,464

Selanjutnya, melalui reduksi terhadap parameter-parameter yang tidak signifikan diperoleh hasil estimasi yang sederhana. Hasil pengujian *redundant coefficient* menunjukkan bahwa F_{hitung} tidak signifikan. Hal ini berarti beberapa variabel independen yang meliputi $DLPMA_{t-1}$, $DLMOGOK_t$, $DLMOGOK_{t-2}$, $DLUMP_t$, $DLUMP_{t-1}$ memang tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian model reduksi dapat digunakan sebagai dasar analisis (Tabel 4 dan Tabel 5).

Tabel 4
Hasil Pengujian *Pedundant Coefficient*

No.	Variabel direduksi	F_{hitung}	F_{tabel} $\alpha = 5\%$	Kesimpulan
1	$DLPMA_{t-1}$, $DLMOGOK_t$, $DLMOGOK_{t-2}$, $DLUMP_t$, $DLUMP_{t-1}$	2,506	4,534	Model reduksi tidak ditolak

Tabel 5.
Hasil Estimasi

No.	Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel ($\alpha=5\%$)
1.	C	0,775)*	2,605	1,812
2.	$DLPMA_{t-2}$	-0,029	-0,128	-1,812
3.	$DLMOGOK_{t-1}$	-0,482)*	-1,846	-1,812
4.	$DLUMP_{t-2}$	-3,206)*	-2,105	-1,812
5.	$UUSP$	-0,332	-1,334	-1,812
6.	ECT_{t-1}	-0,832)*	-2,977	-1,812

Variabel dependen: $DLPMA$ $R^2 = 0,342$

* signifikan pada tingkat ($\alpha=5\%$)

Hasil estimasi juga menunjukkan koefisien variabel ECT_t signifikan dan bertanda negatif. Dengan demikian model yang diestimasi memiliki keseimbangan jangka panjang dan terdapat proses koreksi kesalahan menuju keseimbangan. Nilai koefisien ECT_t sebesar -0,832 menunjukkan bahwa kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*) jumlah penanaman modal asing langsung menuju kondisi keseimbangan adalah 83,2 persen per tahun.

Hasil uji diagnosis menunjukkan bahwa hasil estimasi mengindikasikan tidak adanya gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan residualnya berdistribusi normal. Demikian pula uji linieritas dengan Ramsey-Reset test yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki parameter linier. Dengan demikian model koreksi kesalahan memenuhi anggapan dasar regresi linier klasik dengan menghasilkan estimator yang *BLUE* (*Best Linier Unbias Estimator*).

Ramsey RESET Test:

F-statistic	7.32E-05	Prob. F(1,6)	0.993450
Log likelihood ratio	0.000207	Prob. Chi-Square(1)	0.988508

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.908288	Prob. F(9,7)	0.564033
Obs*R-squared	9.157945	Prob. Chi-Square(9)	0.422824

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.920861	Prob. F(2,9)	0.432662
Obs*R-squared	2.887850	Prob. Chi-Square(2)	0.236000

Normality Jarque-Bera Test:

Jarque-Bera	0,580324	Prob.	0.748143
-------------	----------	-------	----------

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel jumlah pemogokan ($LMOGOK_{t-1}$) dan upah minimum propinsi ($LUMP_{t-2}$) signifikan. Sementara itu, variabel undang-undang serikat pekerja ($UUSP$) tidak signifikan. Demikian pula variabel penanaman modal asing langsung tahun sebelumnya ($DLPMA_{t-2}$) yang juga tidak signifikan.

Koefisien regresi variabel pemogokan sebesar -0,482 menunjukkan bahwa apabila jumlah pemogokan pekerja naik sebesar 1 persen, maka penanaman modal asing langsung mengalami penurunan sebesar 0,482 persen, *ceteris paribus*. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa jumlah pemogokan pekerja berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing langsung. Pemogokan mengakibatkan hilangnya sejumlah jam kerja. Di samping itu, pemogokan membuat kacau target produksi yang sudah ditetapkan. Pemogokan pekerja menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Pemogokan menjadikan investor asing enggan untuk menanamkan modalnya.

Sementara itu, koefisien variabel upah minimum propinsi ($LUMP_{t-2}$) bertanda negatif dan signifikan. Koefisien regresi variabel upah minimum propinsi sebesar -3,206 menunjukkan bahwa apabila upah minimum propinsi naik sebesar 1 persen, akan diikuti dengan penurunan penanaman modal asing pada tahun sebesar 3,206 persen, *ceteris paribus*. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa upah minimum propinsi berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing langsung.

Kenaikan upah minimum propinsi (UMP) menyebabkan terjadinya fenomena upah sundulan sehingga pekerja lain yang upahnya sudah melebihi UMP juga ikut menuntut kenaikan upah. Kenaikan upah minimum dua tahun lalu menyebabkan upah seluruh pekerja pada tahun berjalan mengalami kenaikan. Kenaikan upah meningkatkan biaya produksi sehingga daya saing perusahaan turun. Hal tersebut menyebabkan investor asing enggan menanamkan modalnya.

Selanjutnya variabel undang-undang Serikat pekerja tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tidak berdampak pada jumlah penanaman modal asing langsung. Hipotesis bahwa pemberlakuan undang-undang Serikat Pekerja berdampak negatif terhadap penanaman modal asing langsung tidak didukung. Hal tersebut dikarenakan serikat pekerja di Indonesia masih lemah. Perjuangan serikat pekerja tidak dapat berjalan efektif. Jumlah serikat pekerja yang berlebihan menyebabkan pengusaha mengalami kesulitan untuk menentukan serikat pekerja mana yang berhak mewakili pekerja untuk berunding dalam penentuan tingkat upah.

KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Jumlah pemogokan pekerja dan upah minimum propinsi berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing langsung. Kenaikan jumlah kasus pemogokan dan upah minimum propinsi menurunkan jumlah penanaman modal asing langsung di Indonesia.
- 2) Pemberlakuan undang-undang Serikat Pekerja tidak berpengaruh terhadap jumlah penanaman modal asing langsung.

Saran

- 1) Dalam penentuan upah minimum propinsi (UMP), pemerintah perlu mengkaji secara mendalam agar tingkat upah yang terjadi tidak menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya.
- 2) Pemerintah perlu mengatur hubungan industrial guna meminimumkan jumlah kasus pemogokan pekerja, agar iklim investasi di Indonesia tetap menarik bagi para investor.

- 3) Di samping faktor ketenagakerjaan, maka masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah penanaman modal asing langsung yaitu strategi perusahaan multinasional. Untuk itu penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak strategi perusahaan multinasional terhadap jumlah penanaman modal asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Barutu, C., (2003). "Hak Mogok Buruh dan Implikasinya Bagi Investasi Asing di Indonesia", DPN Apindo, Jakarta.
- Blomström, Magnus dan Ari Kokko, (2003). "The Economics of Foreign Direct Investment Incentives", Working Paper 168, January 2003
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2001). "Pemogokan Menurut Sektor", (www.nakertrans.co.id)
- Feridhanusetyawan, Tubagus, dan Mari Pangestu, (2004). "Indonesia in Crisis: An Macroeconomic Perspective", Working Paper, CSIS, Jakarta.
- Gujarati, D.N., (2003), *Basic Econometric*, McGraw-Hill, Inc.
- Liew, Venus Khim-Sen, (2004). "Which Lag Length Selection Criteria Should We Employ?." *Economics Bulletin*, 33:1-9.
- Markusen, J.R. (1997), "Trade Versus Investment Liberalization". Working Paper No. 6231. National Bureau of Economic Research.
- Susanto, Joko., (2009). "Ketegaran Upah Nominal Pekerja Produksi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: Studi Kasus: Industri Kimia di Indonesia 1997-2005, Kolokium Nasional Program Doktor , UGM, Yogyakarta
- Susanto, Joko dan Purwiyanta, (2010). Pengaruh Variabel Daya Saing dan Kelembagaan Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia, Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UNS Solo, 2010
- UNCTAD, (2000). *The Competitiveness Challenge: Transnational Corporation and Industrial Restructuring in Developing Countries*, United Nation.
- Uttama, Nathapornpan, (2005). "Foreign Direct Investment in ASEAN Countries: An Empirical Investigation", Discussion Papers, University of Nantes.
- Sumber Majalah, Tempo, 20 Januari, 2002.